



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
e-mail: bapenda@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 12 Mei 2023

Kepada
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta
Di
Purwakarta

SURAT PENGANTAR
NOMOR. KPG/644/Sekre/2023

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah MCP KPK Tahun 2023	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

AREA 6 : OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

NO	NAMA OPD	TITIK RAWAN KORUPSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	%	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN
								TW1	TW2	TW3	TW4	
1.	BAPENDA	Database pajak daerah tidak diupdate secara berkala, tidak memetakan potensi pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Hal ini berpotensi/ mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pemda tidak melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dalam meningkatkan pajak daerah. Target pajak daerah tidak ditetapkan berdasarkan potensi pajak daerah yang sebenarnya.	Penguatan Database Pajak	Database Pajak Daerah Terintegrasi	<p>Screenshot sistem/aplikasi database per jenis mata pajak yang menunjukkan pengelolaan database pajak secara elektronik.</p> <p>Catatan: Berdasarkan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pajak Hotel Restoran Hiburan Parkir dan Penerangan Jalan digabungkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Hal ini disinergikan dengan penyesuaian Perda Pajak Daerah.</p> <p>1. <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat: - Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWPD, Nama, alamat dll. - Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. - Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. - Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan - Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak)</p> <p>2. Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak</p> <p>3. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan</p> <p>4. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan</p> <p>5. Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>		<p>1. Menyusun database pajak AKTUAL & POTENSIAL untuk semua mata pajak yang lengkap, akurat, informatif, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan Database Pajak memuat: -Identitas WP/ WAPU meliputi NPWP, Nama>Nama Perusahaan, alamat dll. -Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. -Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. -Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan Database pajak AKTUAL & POTENSIAL disusun melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut: -SIP-PAD (SIMPATDA) -SIP-PBB -SIP-BPHTB -e-SPTPD -Tax Monitoring -SiCeupol -Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah</p> <p>2. Melakukan pemutakhiran database wajib pajak AKTUAL dan POTENSIAL setiap saat berupa pemutakhiran Subyek dan obyek pajak serta pengembangan aplikasi pengelolaan pajak yang ada</p> <p>3. Meningkatkan pengintegrasian database pajak baik yang sudah maupun yang belum, dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>	√	√	√	√	
2.	BAPENDA	Database tunggakan pajak tidak dilakukan evaluasi. Semakin lama akan menjadi tunggakan pajak. Pada akhirnya akan dihapuskan dan menimbulkan potensi kerugian keuangan negara		Database Tunggakan Pajak	<p>1. <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak yang memuat TUNGGAKAN pada masing- masing mata pajak</p> <p>2. Data-data TUNGGAKAN pajak yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak</p> <p>3. Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan</p> <p>4. Bukti bahwa database Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan</p> <p>5. Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p> <p>6. Laporan Hasil Cleansing Data Pajak Daerah dan Pengawasan Cleansing Data Pajak oleh Inspektorat (dapat menjadi bagian dari Reviu Tata Kelola Optimalisasi Pajak Daerah).</p>		<p>1. Menyusun database TUNGGAKAN untuk semua mata pajak yang lengkap, akurat, informatif, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan</p> <p>2. Melakukan pemutakhiran database TUNGGAKAN setiap saat</p>	√	√	√	√	

NO	NAMA OPD	TITIK RAWAN KORUPSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOKUMEN KELENGKAPAN	%	LANGKAH AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN	
								TW1	TW2	TW3	TW4		
3.	BAPENDA	Pemda tidak melakukan upaya dan inovasi untuk peningkatan pajak daerah sehingga tidak ada upaya atas penghindaran pajak daerah oleh Wajib Pajak. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara.	Inovasi Peningkatan Pajak Daerah	Implementasi Inovasi Pajak Daerah	1. Laporan yang menunjukkan implementasi inovasi pajak daerah, misalnya: - Pemasangan alat rekam pajak - Update NJOP - Penertiban Pajak MBLB - Inovasi dalam optimalisasi PKB dan PBBKB, - <i>Cleansing</i> data pajak, dst. 2. Upaya lainnya terkait dengan inovasi dalam rangka upaya peningkatan pajak dan penjelasan efektivitas inovasi dalam mendorong optimalisasi pajak.		- Update NJOP: 1. Melakukan pendataan pemutakhiran 6 objek (buku 4,5) 2. Melakukan pendataan objek pajak buku 1,2,3 3. Melakukan penyesuaian NJOP perumahan di 6 kecamatan - Upaya lainnya: 1. Melakukan uji petik pajak hiburan 2. Melakukan sinkronisasi data dengan perusahaan perihal pengelolaan catering (pajak restoran) di kawasan BIC 3. Melakukan Pendataan Bangunan bersumber dari SPPT yang belum terdata bangunannya 4. Melakukan mutasi kolektif SPPT hasil program PTSL		√		√		
4.	BAPENDA	Pemda tidak melakukan upaya serius dalam meningkatkan pajak daerah. Target pajak daerah tidak ditetapkan berdasarkan potensi pajak daerah yang sebenarnya.		Capaian Peningkatan Pajak Daerah	1. Capaian pajak tahun sebelumnya 2. Target peningkatan pajak tahun berjalan		1. Membuat Laporan Capaian Pajak Tahun Berjalan 2. Membuat Analisis Perbandingan Capaian Pajak Berjalan dengan Pajak Tahun sebelumnya 3. Membuat proyeksi Target Pajak Daerah untuk tahun berikutnya menggunakan Aplikasi E-Forecasting	√	√	√	√		
5.	BAPENDA	Pemda tidak melakukan penagihan pajak daerah karena ada konflik kepentingan. Hal ini berpotensi/mengakibatkan kerugian keuangan negara.		Capaian Hasil Penagihan Tunggakan Pajak daerah	1. Laporan upaya penagihan pajak daerah 2. Capaian realisasi hasil penagihan pajak		1. Membuat Laporan Upaya Penagihan Pajak Daerah hasil Kerjasama dengan Kejaksaan 2. Membuat Laporan Realisasi Hasil Penagihan Pajak Daerah	√	√	√	√		
6.	BAPENDA	Tidak dilakukan pengawasan dana pemeriksaan pajak. Pembiaran mengakibatkan kerugian keuangan negara.	Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	1. SOP pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 2. Laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: a. Data Wajib Pajak yang perlu ditertibkan b. Upaya pengawasan dan pemeriksaan, antara lain melalui sidak/ kunjungan lapangan, pemeriksaan WP, dst c. Pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan d. Kendala, hambatan, evaluasi 3. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat terkait dengan Pajak Daerah serta Tindak Lanjutnya		1. Membuat SOP pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah 2. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah (kegiatan uji petik pajak hiburan) 3. Membuat laporan rekapitulasi pengaduan masyarakat terkait dengan Pajak Daerah		√			√	
7.	BAPENDA	Reviu inspektorat tidak ditindaklanjuti oleh Bapenda. Beberapa hasil reviu berpotensi kerugian keuangan negara.		Tindak Lanjut Reviu	1. Hasil reviu 2. Rekomendasi dan tindak lanjut 3. % TL hasil reviu		1. Melakukan Tindak lanjut rekomendasi hasil Reviu dari Inspektorat Daerah		√				

Purwakarta, 12 Mei 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta